



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 100.3.3.3/220/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-465/2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan usulan rancangan Peraturan Wali Kota yang diajukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/119/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

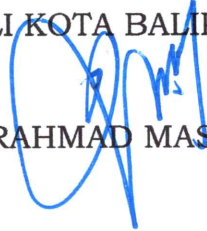
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/119/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 100.3.3.3/220/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 188.45-465/2025 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2026

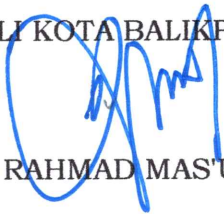
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

| NO | JUDUL                                                                                                                                                                                                                       | STATUS |               | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             | BARU   | PENYEMPURNAAN |                                 |
| 1  | TENAGA AHLI WALI KOTA                                                                                                                                                                                                       | √      |               | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2  | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM                                                                                                                              | √      |               | BAGIAN HUKUM                    |
| 3  | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                      |        | √             | BAGIAN ORGANISASI               |
| 4  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN                                                                                                   |        | √             | BAGIAN ORGANISASI               |
| 5  | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN |        | √             | BAGIAN ORGANISASI               |
| 6  | PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN                                                                                                  | √      |               | BAGIAN ORGANISASI               |
| 7  | PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN                                                                                                                       | √      |               | BAGIAN ORGANISASI               |
| 8  | PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                                                       |        | √             | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN    |
| 9  | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027                                                                                                                                                                                  |        | √             | BAPPEDA LITBANG                 |
| 10 | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026                                                                                                                                                                        |        | √             | BAPPEDA LITBANG                 |
| 11 | RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027                                                                                                                                                                                   | √      |               | BAPPEDA LITBANG                 |
| 12 | PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS                                                                                                                                                                        | √      |               | BAPPEDA LITBANG                 |
| 13 | PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KELURAHAN MANDIRI, ADAPTIF, DAN INOVATIF                                                                                                                                                 |        | √             | BAPPEDA LITBANG                 |

| NO | JUDUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STATUS |               | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BARU   | PENYEMPURNAAN |                             |
| 14 | TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                                                                                                                                                          |        | √             | BKAD                        |
| 15 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                                                                                                                                                    |        | √             | BKAD                        |
| 16 | STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027                                                                                                                                                                                                                                              |        | √             | BKAD                        |
| 17 | PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025                                                                                                                                                                                                                |        | √             | BKAD                        |
| 18 | PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026                                                                                                                                                                                                                         |        | √             | BKAD                        |
| 19 | SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                                                             | √      |               | BKPSDM                      |
| 20 | SISTEM KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √      |               | BKPSDM                      |
| 21 | POLA KARIER                                                                                                                                                                                                                                                                                             | √      |               | BKPSDM                      |
| 22 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                                                       |        | √             | BKSPDM                      |
| 23 | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN                                                                                                                                                                                                                               |        | √             | BPPDRD                      |
| 24 | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI                                                                                                                                                                                                                                                               | √      |               | BPPDRD                      |
| 25 | TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | √             | BPPDRD                      |
| 26 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN , SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |        | √             | BPPDRD                      |
| 27 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN                                                                                                                                                      |        | √             | DINSOS/DISNAKER             |

| NO | JUDUL                                                                                                                                | STATUS |               | PERANGKAT<br>DAERAH/UNIT KERJA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                      | BARU   | PENYEMPURNAAN |                                |
| 28 | PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PADA BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                          |        | √             | DISDIKBUD                      |
| 29 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH |        | √             | DISDIKBUD                      |
| 30 | PENATAAN, PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR                                                                                       | √      |               | DISHUB                         |
| 31 | JAM OPERASIONAL DAN MOBILISASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BALIKPAPAN                                                          | √      |               | DISHUB                         |
| 32 | PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                                  | √      |               | DISKOMINFO                     |
| 33 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA TERPADU KOTA BALIKPAPAN                     |        | √             | DISKOMINFO                     |
| 34 | PEDOMAN SITEPLAN                                                                                                                     | √      |               | DISPERKIM                      |
| 35 | PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI                                                       | √      |               | DISPKERIM                      |
| 36 | PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                             | √      |               | DISPUSTAKAR                    |
| 37 | PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                    | √      |               | DISPUSTAKAR                    |
| 38 | PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BALIKPAPAN                                                             | √      |               | DLH                            |
| 40 | RENCANA AKSI DAERAH SAWIT BERKELANJUTAN                                                                                              | √      |               | DP3                            |
| 41 | POS PELAYANAN TERPADU                                                                                                                |        | √             | DP3AKB                         |
| 42 | PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029                                                                  | √      | √             | DP3AKB                         |
| 43 | PERKAWINAN ANAK                                                                                                                      | √      |               | DP3AKB                         |
| 44 | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI               | √      |               | DPMPSTP                        |
| 45 | PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAH RAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAH RAGA           |        | √             | DPOP                           |
| 46 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG GARIS SEMPADAN                                                         |        | √             | DPPR                           |
| 47 | KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024-2028                                            | √      |               | DPU                            |
| 48 | RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2026-2045                                                                 | √      |               | DPU                            |
| 49 | RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN                                                                            | √      |               | DPU                            |
| 50 | PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN                   | √      |               | INSPEKTORAT                    |

| NO | JUDUL                                                                                                     | STATUS |               | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                           | BARU   | PENYEMPURNAAN |                             |
| 51 | PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI                                                                             | √      |               | INSPEKTORAT                 |
| 52 | PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT                                        | √      |               | KESBANGPOL                  |
| 53 | PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM BERMASYARAKAT                                          | √      |               | KESBANGPOL                  |
| 54 | PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTRIMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2026-2029 | √      |               | KESBANGPOL                  |

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
  
RAHMAD MAS'UD